



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YASIP KHASANI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 741816

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.813.810.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/226 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
2. Tanah Seluas 1427 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 713.500.000
3. Tanah Seluas 640 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 1.024.960.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/68 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.350.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/138 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.414.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, VESPA PRIMAVERA 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARRIER 3.0 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
5. MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000



6. MOBIL, SUZUKI ALL NEW JIMNY Tahun 2023, HASIL SENDIRI
Rp. 470.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	75.955.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	266.487.795
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.570.252.795
III. HUTANG	Rp.	1.063.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.507.252.795

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.